

## BAB 6

### Konservasi Alam dalam Proses Menjadi...

Pelestarian alam atau konservasi keanekaragaman hayati telah membangun sejarahnya sendiri di kepulauan Togean, dengan apa para aktor akhirnya membentuk pengetahuan yang lebih spesifik tentang ‘konservasi’ pada situasi tertentu. Konservasi merupakan saluran di mana pengetahuan global dalam memandang dan berinteraksi dengan alam mendapat sentuhan (*friction*) dari para aktor di kepulauan Togean. Konstruksi identitas adalah salah satu dari persentuhan tersebut.

Suart Hall berpendapat bahwa identitas adalah proses sosial di mana dua sisi yang muncul secara simultan, yaitu penggabungan (*unity*) dan perbedaan (*difference*). Bentuk-bentuk dari penggabungan dan perbedaan ini, disebut sebagai artikulasi (*articulation*), membutuhkan proses membuat batas (*boundary-making*) sekaligus pula penghubungan (*connection*), yang tidak bersifat permanen melainkan tergantung pada konteks mana kepentingan penggabungan maupun pemisahan tersebut memiliki relevansi bagi aktor (Li, 2000:25). Lalu, bagaimana dalam kasus konservasi di kepulauan Togean ini konstruksi identitas sosial tersebut terjadi?

#### 6.1. Para Konservasionis di Kabalutan

DPL adalah salah satu strategi konservasi terumbu karang yang menjadi konteks pembedaan, yang memberi ruang-ruang di mana pembuatan batas dan penghubungan tersebut dapat dilakukan demi membangun identitas sebagai bukan perusak karang atau bukan tukang *babom* dan *babius*. Meski tujuan utama dari DPL adalah melestarikan terumbu karang sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati dunia, namun sebagian aktor, orang-orang Bajau yang menjadi bagian program DPL, juga memanfaatkannya sebagai sebuah ‘proyek kultural’ untuk menegosiasikan kepentingan mereka dengan aktor lain, seperti pengusaha, masyarakat desa lain, serta pemerintah. Sebagian lainnya hanya sekedar berharap DPL dapat membuat mereka lebih mudah mendapatkan ikan-ikan karang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tak ada urusannya

dengan keanekaragaman hayati terumbu karang, apalagi dalam sebuah bentang *the World Coral Triangle*.

Menambang batu karang (*bakubik*), aktivitas para wisatawan saat menyelam, menempatkan jangkar serta membuang sampah sesungguhnya juga perilaku yang didefinisikan oleh ilmuwan sebagai faktor perusak karang, namun sejauh ini tidak menjadi bagian yang dipakai dalam pembentukan identitas sosial sebagaimana babom dan babius. Nelayan dari suku Bajo di Kabalutan tak menyadari bahwa orang desa atau suku lain telah menganggap mereka sebagai pelaku pemboman dan pembiusan, sebagai ‘perusak karang’ atau ‘pengganggu sumberdaya laut’. Pemberian identitas terhadap orang Bajo Kabalutan ini diartikulasikan berdasarkan sejarah pengetahuan, kekuasaan dan ekspresi budaya yang tersimpan dan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka, juga oleh persentuhan mereka dengan wacana-wacana konservasi alam yang dikembangkan oleh LSM, pemerintah, dan pengusaha.

Tak semua nelayan Bajo (di Kabalutan) merasa menjadi bagian itu semua. Sebagian malah menganggap telah dirugikan dari proses pembentukan identitas orang Bajo sebagai tukang babom dan babius. Orang-orang seperti Puh Rais, Puh Sofyan, Puh Kandala, pada konteks tertentu mungkin akan tetap membuat batas, memosisikan dan mengartikulasikan diri mereka untuk menjadi ‘bukan’ itu semua. Ketika konservasi alam dilakukan oleh LSM, ruang untuk menjadi ‘bukan’ tersebut mereka temukan. Konservasi seakan menyediakan batas yang jelas dan memiliki kekuatan (*powerful*) untuk membedakan mereka dengan tukang babom dan babius, yang akhirnya akan mempengaruhi pula relasi sosial mereka. Menjadi konservasi adalah juga menjadi ‘bukan’ itu semua.

## 5.2. Para Konservasionis Lainnya

Taman nasional sebagai sebuah ideologi konservasi sesungguhnya serupa dengan DPL karena mengandung pengetahuan subjektif tentang memahami dan memperlakukan ‘alam’. Keduanya berimplikasi pada pendefinisian tentang siapa dan apa yang sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan konservasi, termasuk di dalamnya proses teritorialisasi. Namun, dalam praktek pengelolaannya, taman nasional (TNKT) memperoleh resistensi yang lebih luas dari beberapa aktor,

dibanding DPL, di mana kontestasi kekuasaan terjadi melalui berbagai wacana. Hal ini ditentukan oleh seberapa banyak aktor yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan TNKT, serta seberapa besar derajat kepentingan tersebut bagi tiap aktor (Sen,2007).

TNKT setidaknya memiliki persinggungan dengan beberapa hal: kehidupan sehari-hari masyarakat kepulauan Togean dalam memanfaatkan sumberdaya alam; penguasaan atas teritori yang jauh lebih luas; penggunaan sejarah mengenai ekspresi-ekspresi kultural pada berbagai bentuk resistensi terhadapnya di tempat lain; keterkaitannya dengan wacana global tentang konservasi alam dan kedaulatan masyarakat 'adat' atas sumberdaya alam; serta penggunaan kekuasaan oleh para aktor pada arena politik di Togean, Tojo Una una, Indonesia, maupun internasional. Tiap aktor akan memaknainya secara berbeda.

Meski demikian, baik TNKT maupun DPL adalah konteks di mana proses memosisikan diri dan artikulasi identitas juga terjadi. Dalam website WALHI termuat sebuah pernyataan sikap yang berbunyi:

CO-Management demikian orang-orang konservasionis mempopulerkan konsep pengelolaan Taman Nasional Laut (TNL), yang saat ini lagi trend didorong untuk menjawab berbagai gejala penolakan konsep pengurusan SDA dan sumber-sumber kehidupan rakyat dengan pendekatan TNL. CO-Management yang usung sebagai sebuah konsep pengelolaan multi-pihak, pada kenyataan ini lapangan menunjukkan hanya sebagai slogan dan bahkan dijadikan "surga telinga" bagi masyarakat, agar melegitimasi pengelolaan SDA dalam bentuk TNL. Pengelolaan bersama (CO-Management) dalam prakteknya sebetulnya sebuah upaya sistematik untuk melakukan penjinakan dan pembunuhan atas sikap kritis masyarakat terhadap pengurusan TNL yang tidak populis. CO-Management merupakan upaya para pihak pro konservasionis ansi untuk mencari "Tameng" atas protes yang dipastikan muncul dari masyarakat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> "CO-management: Memanipulasi Legitimasi Rakyat atas Sumberdaya Pesisir dan Laut". Ini pernyataan sikap yang ditulis pada tanggal 21 Maret 2006 oleh satu orang anggota Walhi dan satunya adalah anggota Toloka. Di Kepulauan Togean, istilah co-management ini diterjemahkan oleh CII dan Pemerintah menjadi 'kolaborasi pengelolaan'. Salah satu pembuat pernyataan ini tercatat pula sebagai anggota Tim Formatur Badan Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Togean. Tim tersebut telah disahkan oleh SK Bupati Tojo Una una ([http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/0603\\_comanajemen\\_ps/](http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/0603_comanajemen_ps/)). Pernyataan ini dibuat sekitar satu bulan setelah terjadi penolakan terhadap keikutsertaan sebuah LSM jaringan Walhi dalam acara sosialisasi tentang pengelolaan TNKT di empat kecamatan yang diselenggarakan CII, BKSDA dan Pemda Touna. Penolakan tersebut hanya terjadi di dua kecamatan. Kasus penolakan inilah yang mendorong Toloka untuk mengirimkan surat protes kepada CI Jakarta, Dirjen PHKA dan Gubernur, sekaligus memohon agar kegiatan CII di kepulauan Togean ditinjau kembali. Saya tak mengikuti acara sosialisasi di mana masyarakat menolak LSM tersebut, namun seorang informan mengatakan bahwa penolakan terjadi akibat 'sejarah' interaksi sosial antara masyarakat dengan Toloka yang dianggap tidak menyenangkan.

Ada yang menarik dari pernyataan tersebut, yaitu soal predikat ‘orang-orang konservasionis’. Siapakah mereka dan apa kepentingan mereka? Hal yang paling jelas adalah julukan tersebut ditujukan pada seseorang atau lembaga yang dianggap mendukung co-management pengelolaan taman nasional (laut). TNL adalah sebuah bentuk ‘konservasi’ yang ditolak, dihindari, dan membawa implikasi yang tak diinginkan oleh rakyat. Terlepas dari konteksnya yang berbeda, praktek konservasi, dalam hal ini pengelolaan TN (L), adalah serupa dengan ‘babom’ dan ‘babius’ yang dianggap merugikan. Suatu kondisi yang tentunya dibangun berdasarkan pengalaman atau sejarah pengetahuan subjektif seseorang.

Penulis pernyataan ini tengah melakukan apa yang disebut sebagai artikulasi identitas melalui wacana co-management TNL. Mereka di satu sisi melakukan pembedaan (*difference*) antara ‘konservasionis’ dan ‘bukan konservasionis’. Sementara pada saat yang sama tengah menyamakan kedudukan mereka dengan bukan konservasionis. Para konservasionis ini juga diletakkan pada posisi mendukung co-management, sedangkan siapa saja yang dimaksud dengan ‘rakyat’, atau paling tidak kedua penulis ini, diletakkan pada posisi yang tidak mendukung *co-management*. Proses ini disebut pula dengan *positioning*. Sedangkan pengelolaan taman nasional laut adalah konteks di mana *positioning* dan *articulation* tersebut terjadi.

Terlepas dari apa pun kepentingan para aktor yang memungkinkan sebuah kawasan konservasi bernama TNKT ini lahir, isu tentang ‘lokalitas’ dan politik identitas atas teritori di mana pemerintah Gorontalo dan Sulawesi Tengah berkontestasi tak bisa diabaikan, sebagaimana diutarakan oleh Bupati Tojo Una una:

"Ini potensi yang sangat luar biasa. Makanya, jangan heran kalau kemudian Provinsi Gorontalo sangat *ngiler* dengan kawasan ini sehingga mereka mengklaim bahwa Teluk Tomini itu adalah bagian dari Gorontalo. Padahal, ini milik kami Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah," tegas Damsik Ladajalani.<sup>2</sup>

Seperti apa pun negara mendefinisikan kepulauan Togean melalui kebijakannya, bagaimana pun kontestasi kekuasaan terjadi, serta wacana apa pun yang dibangun para aktor tentang kepulauan Togean; hidup keseharian nelayan-

<sup>2</sup> [www.jurnalnasional.com](http://www.jurnalnasional.com). Kepulauan Togean ingin terkenal bak Bunaken. Jumat, 17 Agustus 2007.

nelayan Bajo di Kabalutan mungkin akan tetap berada pada situasi di mana terjadi konstruksi identitas mereka sebagai tukang babom dan babius, perusak tempat-tempat di mana ikan dapat ditangkap, pelaku yang mengancam masa depan bisnis para pengusaha, serta sebagai orang-orang yang menjadi target ‘pemberdayaan’ melalui proyek pemerintah. Identitas tersebut dipahami mereka sebagai identitas yang berpengaruh terhadap relasi sosial dan kekuasaan antara mereka dengan aktor lain.

Di luar mereka, pengelola *dive operator* tengah menggunakan ‘konservasi’ ketika mempertahankan wilayah-wilayah konsesinya yang selama ini mampu mendatangkan dolar. Polisi, jaksa atau masyarakat desa lain di kepulauan Togean mungkin sedang mengartikulasikan diri menjadi konservasi ketika menggeledah, mengusir atau menangkap orang Bajo yang diduga babom dan babius. Gubernur, bupati, CII, dan aktor lain yang bukan Bajo Kabalutan juga menjadi ‘konservasionis’ ketika mendukung pembentukan TNKT. Mereka menggunakan konservasi alam pada konteks dan kepentingan yang berbeda-beda, didasari pengetahuan historis tentang konservasi yang berbeda, lalu diartikulasikan melalui bentuk-bentuk ekspresi yang juga berbeda satu sama lain. Ketika makna tentang konservasi berubah pada konteks yang lain, maka proyek ‘menjadi konservasionis’ juga harus dipahami kembali efektifitasnya dalam proses interaksi sosial mereka. Apakah seorang ‘konservasionis’ menguntungkan atau merugikan bagi dirinya?